

**TEORI DAN KONSEP DASAR PEMBIAYAAN (COST)  
DALAM PENDIDIKAN ISLAM  
(Rencana, Organisasi, Pelaksanaan, dan Pengawasan)**

***THEORY AND BASIC CONCEPT OF COST IN ISLAMIC EDUCATION  
(Planning, Organization, Implementation, dan Supervision)***

**Ade Sopiali**

Program Pascasarjana, Program Studi manajemen Pendidikan Islam  
IAIN Surakarta

*E-mail: adejpr17@gmail.com*

***Abstract***

*This study describes the theory and basic concepts of cost in Islamic education. The method in this research uses a qualitative approach with descriptive research type. Analysis of research data using descriptive analysis. The process was carried out from the time the data was collected, so that when it was in the field, researchers had started to process the data analysis until the study ended. This study concludes that: 1) education financing is one way so that the education delivery process can be carried out effectively and efficiently. education financing is a fund given to schools to facilitate every activity of the learning process in schools, and for various purposes in the provision of education; 2) The factors that influence the financing of school education are influenced by: a) rising prices; b) relative changes in teacher salaries (teacher's salaries); c) changes in population and an increase in the percentage of children in public schools; d) increasing educational standards (educational standards); e) increasing age of children leaving school; and f) increased demands for higher education (higher education); 3) Sources of education financing in schools can be categorized or categorized into five, namely: routine budget and APBN (development budget) Education support fund (DPP); Donation / donation from BP3; Contribution from local government (if any); Miscellaneous assistance (which is not binding); government and local government assistance; 4) How to Manage Financing is First, the problem of financing is a very sensitive issue. Second, with regard to the placement of fund allocations, efforts are made for the parties in it to be able to compile and manage well, how much budget is there, how the budget is spent or allocated, and how the reporting system is. Third, the principal as the driving force is expected to have entrepreneurial skills (entrepreneurial skills) and managerial and supervisory skills. Fourth, madrasahs should involve the community in budgeting for education funding, through regular meetings or it can be inserted at a school promotion / graduation meeting. Fifth, Islamic education institutions, in this case madrasahs, as institutions based on religion in which there are noble values, are expected to uphold the principles of justice, the principles of trust, honesty, deliberation, openness, discipline, and so on.*

***Keywords:*** *basic concept of financing (cost), Islamic education*

**Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan teori dan konsep dasar pembiayaan (*cost*) dalam pendidikan Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data penelitian menggunakan analisis

deskriptif. Prosesnya dilakukan semenjak pengumpulan data, sehingga saat dilapangan, peneliti sudah mulai melakukan proses analisis data hingga penelitian berakhir. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1) pembiayaan pendidikan merupakan salah satu cara agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: a) kenaikan harga (*rising prices*); b) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); c) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*); 3) Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut bisaa dikategorikan atau dikategorikan menjadi lima yaitu: Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan) Dana penunjang pendidikan (DPP); Bantuang/sumbangan dari BP3; Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada); Bantuan lain-lain (yang tidak mengikat); bantuan pemerintah dan pemerintah daerah; 4) Cara Mengelola Pembiayaan adalah Pertama, persolan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya. Kedua, terkait dengan penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Ketiga, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewira-usahaan) dan kemampuan manajerial serta kesusupervisian. Keempat, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Kelima, lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, sebagai lembaga yang berbasis agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya.

**Kata Kunci:** *konsep dasar pembiayaan (cost), pendidikan Islam*

## PENDAHULUAN

Banyak hal yang menjadi penyebab tidak dapat berkembang dengan baik sarana dan prasarana tersebut, salah satunya yakni pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena kepala madrasah dan bendahara madrasah sebagai pengelola keuangan tidak bisa memamanajemen keuangan madrasah dengan baik.

Adanya standar yang telah

ditetapkan pemerintah itu, bertujuan agar pendidikan dapat menjadi sebuah wadah untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin (Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, 1993).

Pada penelitiannya Dedy mendapatkan hasil, sebagai berikut: (a) Pemerintah Kabupaten Bandung dalam

membiayai pendidikan di tingkat madrasah dasar, yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, belum memiliki dasar yang kuat; (b) Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan untuk dapat mendukung proses pendidikan, belum dipahami secara jelas; (c) Besaran biaya dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah dasar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, belum dapat diperhitungkan secara tepat; (d) Efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan, yang dilihat dari ketercapaian target dibandingkan dengan besarnya dana yang dialokasikan, belum jelas ukurannya; dan (e) Model pengelolaan pembiayaan madrasah dasar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, belum tersedia (Achmad, 2019).

Pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam lembaga Pendidikan Islam salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan atau biaya adalah merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah Islam sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah Islam, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi (Sulistyorini, 2006).

Meningkatkan keefektifan dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah/madrasah. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah/madrasah. Dan meminimalkan penyalahgunaan

anggaran madrasah/madrasah (Fattah, 2008).

Dalam sejarah kejayaan Islam dulu, dalam hal pendidikannya menjadi mercusuar dunia yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang ahli dalam berbagai cabang bidang keilmuan yang dimiliki. Dan tentunya mereka juga terlahir dari sebuah tempat/lembaga pendidikan yang juga sangat baik pada zamanya. Sebut saja madrasah Nidhomiyah yang merupakan prakarsa dari penguasa waktu itu yaitu Nizham al-Mulk yang kemudian tersebar di berbagai wilayah, antara lain, Baghdad, Naisapur, Isfahan, Bashra, dan Mosul (Koontz, 2010).

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah (Munir, 2013). Yang menjadi masalah adalah, bagaimana masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan Islam yang di Indonesia, jumlahnya sangat banyak. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang ada, sehingga mengalami kesenjangan dalam pelaksanaan. Keterbatasan dana

menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik.

Penelitian ini akan mengupas model manajemen pembiayaan pendidikan yang ideal dalam perspektif Islam. Tidak hanya berbicara konsep, penulis juga memaparkan corak manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang telah tercatat dalam ruang sejarah pendidikan Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Prosesnya dilakukan semenjak pengumpulan data, sehingga saat dilapangan, peneliti sudah mulai melakukan proses analisis data hingga penelitian berakhir. Artinya, hal-hal yang terkait dengan teori dan konsep dasar pembiayaan (*cost*) dalam pendidikan Islam dianalisis secara mendalam.

### **PEMBAHASAN**

Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru/ dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (*revenue theory of cost*). Pembiayaan pendidikan tidak

hanya menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan, (Kurniawan, 2018).

Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Menurut Levin (1987) pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Menurut Nanang Fattah biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Ada beberapa landasan teori motivasi untuk mengetahui tingkah laku seseorang. Frued, seseorang tokoh psikoanalitis yang sangat tersohor dalam *teori psikoanalisis*, mengatakan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh dua ketetapan dasar, yaitu: insting kehidupan dan insting kematian. Insting kehidupan menapakkan diri dalam tingkah laku seksual, sedangkan insting kematian melatar belakangi tingkah

laku- tingkah laku agresif. *Teori kognitif* menurut pandangan filsuf kuno seperti *Pluto, Aristoteles* bahwa tingkah laku tidak digerakkan oleh apa yang disebut motivasi, melainkan oleh rasio. Dalam teori ini sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku atau motif.

Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Dalam pengertian ini, misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku sekolah dan guru juga adalah biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola adalah merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*), (Achmad, 2019).

Biaya (*cost*) dapat diartikan pengeluaran yang dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis: *pertama*, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Kedua*, biaya pendidikan

yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. *Ketiga*, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Dan *keempat*, dari lembaga pendidikan itu sendiri, (Harsono, 2007).

### **Faktor faktor yang mempengaruhi Biaya**

Menurut Iskandar (2011), lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu dalam hal biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya produksi. Produksi pendidikan diartikan sebagai unit pelayanan khusus (units of specific services). Unit output harus meliputi dimensi waktu, seperti tahun belajar atau jam belajar agar biaya-biaya dalam memper- siapkan output dibandingkan input. Input meliputi barang-barang yang dibeli dan orang-orang yang disewakan untuk menyediakan jasa. Di antara masukan (input) yang penting dalam sistem bidang pendidikan ruang, peralatan, buku, material, dan waktu para guru dan karyawan lain. Output menjadi hasil tambahan yang diakibatkan oleh suatu kenaikan biaya pendidikan yang diterima di sekolah, sepanjang masukan (input) menjadi bagian dari biaya kenaikan. Suatu unsur biaya tambahan, yang ada dalam fungsi produksi yang terdahulu, menjadi biaya kesempatan dari peserta didik,

(Iskandar, 2013).

Analisis mengenai biaya produksi pendidikan pada dasarnya menggunakan model teori “input-proses-output” di mana sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa. Menurut Blaug (1992) dan (Idochi dan Anwar, 2004), kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes pada fungsi produksi pendidikan, bahwa hubungan antara input sekolah di satu pihak, dan output sekolah di lain pihak secara konvensional diukur melalui skors-skors achievement.” Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (rising prices); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s salaries); 3) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan (educational standards); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (higher education), (Iskandar, 2013).

### **Jenis Pembiayaan Pendidikan.**

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

#### **1. Biaya Langsung (*direct cost*)**

Menurut Anwar (1993:30) Biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Biaya rutin (recurrent cost). Biaya rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah.

#### **2. Biaya tidak langsung (*indirect cost*)**

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya, biaya pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis antara lain:

- a. Biaya Pribadi (*private cost*), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya.
- b. Biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi).
- c. Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan
- d. Semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun didalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan

pendidikan.

### **Sumber-sumber Pendidikan**                      **Pembiayaan**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah.
- 2) Kemudian dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan Pemerintah; bantuan pemerintah daerah; bantuan pihak asing yang

tidak mengikat; bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau sumber lain yang sah.

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan terkait dengan masalah bagaimana mencari dana (sumber dana), bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut bisaa dikategorikan atau dikategorikan menjadi lima yaitu :

- a. Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan) Dana penunjang pendidikan (DPP)
- b. Bantuang/sumbangan dari BP3
- c. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada)
- d. Bantuan lain-lain
- e. bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Imbal Swadaya, BOMM, BOP, BKG, dan BKS, selain lebih bersifat insidental dan tidak menyeluruh, juga tidak seluruh madrasah memperolehnya. Biasanya, berbagai bantuan tersebut diperoleh setelah madrasah mengajukan

permohonan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam berbagai kasus yang terjadi di berbagai daerah, hanya beberapa madrasah tertentu yang mendapatkannya. Dalam hal ini, faktor kedekatan unsur penyelenggara madrasah dengan pihak pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran bantuan tersebut. Adapun madrasah yang tidak memiliki akses kepada pihak-pihak tertentu sangat sulit mendapatkannya.

Setidaknya sekolah atau madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan menganut pada sila ke lima Pancasila yang berbunyi “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam kandungan sila kelima tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan di dalam dunia pendidikan, hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, (Baharuddin dan Moh. Makin, 2010).

### **Karakteristik Pembiayaan Pendidikan**

Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi:

1) Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk

penyelenggaraan pendidikan.

2) Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda.

3) Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar

b. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai “*human investment*”, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.

c. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.

d. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum.

e. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

Secara aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun madrasah dalam segala aktivitasnya, memerlukan sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan

kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada. Semua itu memerlukan anggaran dana. Yang menjadi masalah adalah, bagaimanakah masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan Islam yang di Indonesia, jumlahnya sangat banyak. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang ada, sehingga mengalami kesenjangan dalam pelaksanaan. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik (Munir, 2013).

### **Komponen Biaya Pendidikan**

Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Hallak menjelaskan bahwa banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuat anggaran. Komponen-komponen yang dimaksud adalah : Peningkatan KBM, Peningkatan pembinaan kegiatan siswa, Pembinaan tenaga kependidikan, Rumah tangga sekolah, Pengadaan alat-alat belajar, Kesejahteraan, Pengadaan bahan pelajaran, Perawatan, Sarana kelas, Pengadaan alat-alat belajar, Sarana sekolah, Pembinaan tenaga kependidikan, Pembinaan siswa, Pengadaan bahan pelajaran, Pengelolaan sekolah, Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan,

Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

Manajemen biaya merupakan konsep yang sangat luas yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif biaya maupun informasi non keuangan yang ada kaitannya dengan produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi. Informasi keuangan saja dapat menimbulkan *mis-leading* karena informasi tersebut cenderung berfokus pada jangka pendek. Agar dapat mencapai titik keberhasilan yang sifatnya kompetitif, maka suatu organisasi atau lembaga perlu memfokuskan perhatiannya pada informasi sumber biaya yang memiliki waktu lebih panjang dan sifatnya *sustainable*, (Blocher, 2001).

Setiap lembaga harus mengetahui berapa biaya yang dihabiskan untuk melakukan suatu upaya pelayanan jasa atau pencetakan produk tertentu atau biaya untuk mengembangkan suatu jasa baru. Dengan demikian, akan diketahui sirkulasi besaran anggaran yang dikeluarkan dan tidak sembarangan menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan informasi manajemen biaya yang dibutuhkan, di antaranya adalah:

1. Manajemen strategik: untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemulihan produk, metode proses, teknik, dan saluran pemasaran serta hal-hal yang bersifat jangka

panjang.

2. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang sifatnya berkelanjutan kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan.

Dengan pengetahuan tentang informasi manajemen pembiaya- an tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas jasa atau produk serta dapat meningkatkan profitabilitas untuk meng-*upgrade* fasilitas layanan pada saat yang tepat dengan berbagai metode layanan terbaru.

- Pembiayaan (*finacing*).

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan terkait dengan masalah bagaimana mencari dana (sumber dana), bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas, (Muhaimin & Majid, 2013).

- Keuangan(*finance*).

Persoalan keuangan di setiap lembaga pendidikan, tidak hanya mencakup uang pembiayaan yang sah semata, namun juga kredit bank. Definisi secara sederhana tentang

keuangan (*finance*) adalah seni nuntut mendapatkan alat pembayaran. Sementara dalam dunia usaha, keuangan meliputi pemeliharaan kas, yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Alat yang digunakan dalam keuangan meliputi seluruh metode peminjaman uang dan pertukaran satu jenis hak yang berkenaan dengan yang lainnya. Dalam perusahaan dagang, penggolongan keuangan yang utama adalah: perbankan, pasar uang, pasar investasi yang terdiri dari pasar sekuritas dan penerbitan model baru atau kenaikan dana dari penanaman modal untuk perluasan modal baru, pasar uang luar negeri, dan asuransi, (Muhaimin & Majid, 2013).

- Anggaran (*budget*)

Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga.

- Biaya (*Cost*)

Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen. Di sisi lain, biaya adalah harga pokok yang merupakan gambaran pengorbanan dalam pengertian kuantitatif pada saat barang atau jasa dipertukarkan.

- Pemicu Biaya (*Cost Driver*)

Pemicu biaya (*cost driver*) menurut Brocher dkk. adalah faktor yang memberi dampak pada biaya perubahan. Artinya, jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh *cost driver* sebagai faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dari suatu objek biaya. Identifikasi dan analisis terhadap *cost driver* merupakan langkah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi.

Sebagai contoh, biaya bahan bakar (objek biaya) di dalam suatu pabrik yang digunakan untuk pembangkit listrik, yang di- pengaruhi oleh rentan waktu yang dibutuhkan merupakan *cost driver* untuk biaya bahan bakar. *Cost driver* umum lainnya adalah jumlah produk yang dihasilkan, jumlah mesin yang di-*setup*, jumlah perubahan desain yang dilakukan untuk membuat suatu

produk serta jumlah promosi, pemasaran, dan distribusi.

Para perencana, pakar dan praktisi pendidikan perlu mencermati secara seksama bahwa berdasarkan pengalaman setelah 17 tahun reformasi masih banyak kendala yang dihadapi, sehingga desentralisasi tidak menghasilkan perubahan yang positif dalam kinerja sistem pendidikan, antara lain mutu pendidikan yang semakin merosot. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah mulai tahun akademik 2018 penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dikelola oleh pemerintah daerah provinsi masing-masing, sebagai amanat UU No. 32/2014. Desentralisasi yang telah berjalan, tidak sepenuhnya diikuti dengan pemantapan sistem pendidikan yang paralel dengan penyiapan SDM di tingkat daerah dan sekolah, sehingga daerah dan sekolah memiliki komitmen, integritas dan konsisten dalam mencapai sasaran-sasaran pendidikan (Gani, 2019).

### **Problem Pembiayaan Pendidikan Islam di Indonesia**

Pada umumnya, masalah yang dihadapi madrasah, dalam hal ini sekolah yang berbasis agama, adalah persoalan pembiayaan pendidikan. Apabila dilihat dari aspek penyebabnya, hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di madrasah menyebutkan bahwa kesulitan yang

dihadapi madrasah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ternyata berawal dari persoalan penggalan dana itu sendiri. Kendala utamanya adalah karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali. Selama ini sumber dana utama operasional madrasah, rata-rata diperoleh dari iuran SPP siswa. Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap, meskipun secara nominal sebenarnya jumlah dana yang dapat dikumpulkan tidak seberapa, mengingat kebanyakan madrasah berada di pinggiran kota/pedesaan dan melayani pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi kurang mampu; seperti petani, buruh, dan pegawai rendah lainnya. Pendeknya, madrasah memperoleh pemasukan dari komponen SPP dalam jumlah yang tidak besar karena madrasah sendiri harus menetapkan besaran biaya SPP yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di mana ia berada. Namun hal ini sudah mengalami perubahan seiring dengan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh Sekolah Dasar dan Menengah. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup pembiayaan pendidikan yang diperlukan.

Contoh dari Hasil penelitian Lutfhia Yuli mengatakan: 1) Perencanaan pengelolaan dana di MIS Karya Pembangunan dituangkan dalam RAPBM yang diadakan setiap akhir tahun ajaran dengan melibatkan yayasan,

komite madrasah, pihak madrasah dan wali murid. Dalam RAPBM terdapat anggaran keperluan sarana dan prasarana sehingga dapat merencanakan, mengadakan, memelihara, penginventarisasian serta penghapusan sarana dan prasarana dengan baik. Adapun sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari SWP, dana BOS dan pendapatan lain-lain. 2) Pelaksanaan anggaran pendidikan dalam prosesnya menjadikan RAPBM sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan dalam pengendalian dana madrasah sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala madrasah. 3) Pertanggungjawaban keuangan madrasah berupa laporan keuangan madrasah oleh bendahara madrasah, yang dilakukan pada setiap satu tahun sekali dalam bentuk (Laporan Pertanggungjawaban). Laporan dana BOS, dilakukan setiap semester dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban,(Kesuma, 2018).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya atau dana,(Kurniawan, 2018).

Pembiayaan pendidikan

merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Kata kunci tidak diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya

bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga Negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya, (Ferdinandi, 2013)

### **Solusi Perbaikan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam**

Menelaah problem yang cukup dilematis di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemecahannya. Menurut hemat penulis perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan.

*Pertama*, persoalan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya. Hal ini karena bisa membawa kemajuan lembaga jika dikelola dengan baik, sebaliknya akan membawa lembaga menjadi terpuruk, apabila komponen/pihak di lembaga tidak mengelola secara profesional, tidak berprinsip pada keterbukaan, tidak berorientasi pada perbaikan, kepentingan yang sifatnya personal untuk membangun lembaga sehingga mencari peluang hanya untuk personal dirinya. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, kaitannya dengan proses penyusunan pembiayaan pendidikan, harus dilibatkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan, kebersamaan, serta bertanggung jawab atas amanah kelembagaan yang harus dipikul bersama. Baik dan buruknya lembaga menjadi akuntabilitas bersama.

*Kedua*, terkait dengan

penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Apabila komponen di dalamnya ada yang kurang mengerti, perlu dilakukan Diklat tentang bagaimana menyusun anggaran yang baik. Bisa dengan pelatihan penyusunan anggaran atau hal lain yang sejenis.

*Ketiga*, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian.

*Keempat*, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikian dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan.

*Kelima*, lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, sebagai lembaga yang berbasiskan agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen lembaga.

Dengan demikian, diharapkan ada solusi manajemen pembiayaan pendidikan Islam, sehingga akan terbentuk suatu lembaga pendidikan Islam yang baik, khususnya dalam

persoalan pembiayaan pendidikannya (Munir, 2013).

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu cara agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: a) kenaikan harga (*rising prices*); b) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); c) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*).

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut bisaa dikategorikan atau dikategorikan menjadi lima yaitu: Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan) Dana penunjang pendidikan (DPP); Bantuang/sumbangan dari BP3; Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada); Bantuan lain-lain (yang tidak mengikat); bantuan pemerintah dan pemerintah daerah.

Cara Mengelola Pembiayaan adalah Pertama, persolan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya. Kedua, terkait dengan penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Ketiga, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian. Keempat, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Kelima, lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, sebagai lembaga yang berbasis agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 159.
- Achmad, Dedy Kurniady, *Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Dasar di Kabupaten Bandung*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 12 No. 1, hlm. 35-36. 2019
- Ahmad Nunu, *Pembiayaan Pendidikan di Madrasah dan Peranan Pemerintah Daerah di Era Otonomi*, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Bandung, Volume 5 Nomer 2 April-Juni 2007.
- Ahmad Munir Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2013.
- Blocher, et. al. 2001. *Manajemen Biaya Dengan Tekanan Strategis*. Penerjemah. Susty Ambarrini. Jakarta: Salemba.
- Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: P. Remaja Rosda Karya, 2006),
- Fattah, Nanang. (2008). *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*. Jurnal Pendidikan, No. 9
- Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 10.
- Iskandar, Uray. 2011. *Faktor Yang Mempengaruhi Biaya*. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2013 dari : [http://urayiskandar.blogspot.com/2011/04/faktor\\_yang\\_mempengaruhi\\_biaya.html](http://urayiskandar.blogspot.com/2011/04/faktor_yang_mempengaruhi_biaya.html).
- Koontz, Harold. O Donnel dan Heinz Wehrich. 2010. *Management*. McGraw Hill Kogaguska.
- Luthfia Yuli Kurniawan, 2018. Konsep

- Dasar Pembiayaan Pendidikan Universitas Negeri Padang Indonesia.
- Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), 135.
- Muhaimin & Majid, Abdul. 2013. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Tri Genda Karya,
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: elKAF, 2006),
- 98
- Yahya “*System Manajemen Pembiayaan pendidikan: suatu studi tentang pembiayaan pendidikan sekolah dasar diprovinsi Sumatra Barat*, Disertasi, Bandung Sekolah Pasca Sarjana Unversitas Pendidikan Indonesia, 2003, hlm. 43-44.